



ANALISIS MODEL-MODEL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SIMPAN PINJAM KELOMPOK MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU

Ardiyati¹

¹Universitas Amikom Yogyakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 31 Juli 2018

Disetujui: 26 September 2018

Dipublikasikan: 29 September 2018

Kata Kunci:

Model-Model

Program

Pemberdayaan,

Pemberdayaan

Masyarakat,

Kelompok Simpan

Pinjam

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai model program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk simpan pinjam kelompok di Provinsi Riau. Obyek penelitian ini adalah program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk simpan pinjam kelompok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara dan update data penelitian program sejenis di Provinsi Riau. Hasil penelitian mengidentifikasi adanya berbagai jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan simpan pinjam kelompok di Provinsi Riau. Program tersebut adalah kegiatan kelompok simpan pinjam perempuan yang merupakan bagian dari Program PNPM Mandiri Pedesaan, Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UED-SP) yang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) serta program Lembaga Ekonomi Desa (LED). Berbagai program tersebut dapat dirasakan bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi mikro. Program simpan pinjam yang berlokasi di desa/kelurahan lebih disukai karena lebih dekat dan dapat dirasakan manfaatnya. Adanya program simpan pinjam yang lebih dekat di tingkat desa/kelurahan membuat Program Simpan Pinjam PNPM Mandiri Pedesaan yang berlokasi di kecamatan kurang diminati. Untuk menjaga kelestarian program perlu dilakukan pembentukan simpan pinjam berbadan hukum untuk mengelola dana simpan pinjam sehingga tetap lestari meskipun masa pendampingan program sudah selesai. Perlu adanya kerjasama antara lembaga pengelola simpan pinjam kelompok sehingga dana dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.

ANALYSIS OF COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM MODELS THROUGH SAVINGS AND LOAN OF COMMUNITY GROUP IN RIAU PROVINCE

Keywords:

Empowerment
Program Models,
Community
Empowerment,
Savings and
Loan Group.

Abstract

The research was conducted to identify and analyze various models of community empowerment programs in the models of savings and loans group in Riau Province. The object in this study is a community empowerment program in the models of savings and loans groups. The research method used is descriptive qualitative by conducting observations, interviews and research data updates of similar programs in Riau Province. The results of the study identified the existence of various types of community empowerment activities in the models of group savings and loan activities in Riau Province. The program is an activity of women's savings and loan groups which are part of the Rural PNPM Mandiri Program, Productive Economic Business Activities (UED-SP) which are part of the Village Empowerment Program (PPD) and the Village Economic Institution (LED) program. These various programs can be felt useful to grow the micro economy. The savings and loan program located in the village / kelurahan is preferred because it is closer and can be felt by the benefits. The existence of a savings and loan program that is closer at the village / kelurahan level makes the PNPM Mandiri Rural Savings and Loans Program located in sub-districts less desirable. To maintain the sustainability of the program, it is necessary to establish legal entity savings and loans to manage savings and loan funds so that they remain sustainable even though the program assistance period has been completed. There needs to be collaboration between the group savings and loan management institutions so that funds can be maximally beneficial for the community.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:
ardiyati@amikom.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemiskinan masih menjadi permasalahan dalam pembangunan di berbagai negara. Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan selalu dipantau perkembangannya dari tahun ke tahun. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu paradigma pembangunan dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat menurut Chambers (dalam Kartasasmita, 1996) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan ekonomi. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainability*”. Pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi (2007) juga menjadi strategi pilihan dalam konteks pembangunan

alternative. Muncul konsep pembangunan alternative dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (program pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat. Mubyarto (dalam Hatu, 2010) menekankan terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, proses pemberdayaan diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Program pemberdayaan masyarakat telah ada sejak zaman Pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan nama program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa modal bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp.20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir diberikan selama 3 tahun anggaran.. Sejalan dengan bantuan tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan Inpres Desa Tertinggal, kemudian lahir generasi kedua program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum tahun 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-Program tersebut tidak terintegrasi dan berjalan sendiri-sendiri tergantung pada kebijakan departemen yang bersangkutan. Departemen Dalam Negeri melalui bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyelenggarakan program Pengembangan Kecamatan fase 1 pada tahun 1998/1999. Saat terjadinya krisis ekonomi berubah menjadi Program Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Pada tahun 2002 muncul program Pengembangan Kecamatan Fase 2. Program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW, dan Pariwisata. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertransformasi menjadi program PNPM Pedesaan.

Program PNPM Pedesaan atau Rural PNPM mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998-2007. Lokasi sasaran meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Pedesaan. Kelompok sasaran PNPM Mandiri pedesaan adalah: (1) masyarakat miskin di pedesaan (2) kelembagaan masyarakat di pedesaan, (3) kelembagaan pemerintahan lokal. Pelaksanaan PNPM Mandiri di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementerian dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (*Corporate Social Responcibility*) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara donor.

Program PNPM Mandiri terbuka untuk semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati oleh masyarakat meliputi: (1) kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan, (2) pembangunan sarana dan prasana yang dibutuhkan masyarakat miskin yang mendukung kegiatan ekonomi, (3) kegiatan peningkatan kualitas hidup melalui bidang kesehatan dan pendidikan, (4) kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (tidak termasuk penambahan modal). Kegiatan modal bergulir dikenal dengan nama kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diperuntukan untuk kelompok perempuan. Program dana bergulir berupa simpan pinjam kelompok banyak direplika oleh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi RIAU.

B. Identifikasi Permasalahan

1. Mengidentifikasi program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan bentuk simpan pinjam kelompok di Provinsi Riau
2. Membandingkan hasil-hasil program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan bentuk simpan pinjam kelompok di Provinsi Riau

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Simpan Pinjam Kelompok

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Friedman (dalam Budiman, 2007) menyampaikan pemberdayaan terkait dengan proses pengentasan kemiskinan merupakan kesenjangan kemiskinan merupakan suatu kesenjangan (ketiadaan) akses terhadap unsur-unsur kekuasaan sosial yang mencakup aspek:

1. Ketiadaan tempat tinggal/ruang tinggal didalamnya lingkungan fisik dimana keluarga memasak, makan, tidur dan menyimpan benda-benda pribadi.
2. Ketiadaan waktu, jumlah waktu yang tersedia untuk dapat memperoleh kebutuhan subsistensinya.
3. Pengetahuan dan ketrampilan, termasuk di dalamnya tingkat pendidikan yang rendah dan pelatihan ketrampilan tertentu untuk bekerja.
4. Informasi tepat-guna, termasuk didalamnya informasi mengenai segala aspek kehidupan juga kesempatan ekonomi, metode produksi, metode sanitasi, metode pemeliharaan balita, ketersediaan akses pelayanan umum, dll.
5. Organisasi sosial, baik formal maupun informal.
6. Jaringan sosial, berupa akses untuk kegiatan melakukan kegiatan kerjasama bagi munculnya tindakan pribadi yang mandiri. Keluarga yang mempunyai akses jaringan kerjasama horizontal antar sesama keluarga atau dengan lembaga.
7. Alat kerja dan kehidupan, tercakup didalamnya alat-alat produksi bagi keluarga.
8. Sumberdaya keuangan, termasuk tingkat pendapatan keluarga dan akses terhadap sumber daya kredit baik formal maupun informal

Konsep Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam Kelompok

Salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi ketidakberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan usaha mikro. Permodalan menjadi masalah yang urgen dalam pengembangan usaha mikro, disisi lain usaha mikro mempunyai berbagai karakteristik yang membuat mereka sulit mengakses permodalan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Kondisi tersebut memunculkan jenis simpan-pinjam kelompok yang disertai dengan program pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk pelatihan manajemen usaha, seperti administrasi keuangan, teknik produksi, pemasaran, manajemen kelompok, dll. Selain bertujuan untuk mengembangkan usaha pendampingan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat juga bertujuan agar usaha mikro biasa akses permodalan ke lembaga keuangan. Program Pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman kelompok pada awalnya banyak digunakan oleh pemerintah dan lembaga-

lembaga non profit seperti lembaga swadaya masyarakat dengan pendanaan lembaga donor. Pola pinjaman kelompok dan bukan hibah diberikan dalam upaya memberikan edukasi tanggungjawab dan kemandirian kepada masyarakat dalam pengelolaan dana yang digulirkan sehingga terjadi keberlanjutan. Modal bergulir melalui kelompok juga diperlukan masyarakat karena masyarakat miskin belum mampu melakukan akses pinjaman ke lembaga keuangan Bank karena terbentur pada skala usaha dan tidak memiliki barang jaminan seperti surat dan barang berharga.

Sulitnya akses permodalan usaha mikro mendorong munculnya kredit mikro. Grameen Banking (dalam Wardoyo dan Prabowo, 2005:3) mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman bank tradisional. Kredit mikro merupakan arisan pinjaman modal untuk mendukung pengusaha kecil dalam beraktivitas, umumnya dengan alternative jaminan kolateral dan system monitoring pengembalian. Pinjaman diberikan untuk melayani modal kerja sehari-hari, sebagai modal awal untuk memulai usaha atau sebagai modal investasi untuk pembelian asset tidak bergerak. Pada umumnya kredit mikro melayani area geografis tertentu atau masyarakat tertentu seperti wanita, anak-anak dan orang cacat. Kebanyakan usaha kredit mikro menawarkan beberapa bentuk seperti bantuan teknis, seperti pelatihan usaha kecil, pertukaran pengalaman diantara anggota, dan peluang *networking*. Kredit mikro juga didefinisikan sebagai pinjaman dalam jumlah kecil, jangka pengembalian yang lebih pendek, regulasi pinjaman flexible dan mudah dimengerti, aktivitas usaha dalam skala kecil tergantung kebutuhan dan kondisi lokal, nasabah berasal dari usaha kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah, pinjaman digunakan untuk meningkatkan pemasukan, mengembangkan kewirausahaan dan digunakan komunitas untuk kebutuhan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Bliss, *Geography Teachers Association of New South Wales for Geography Bulletin*:2005)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 1994:3) adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam bahasanya di dalam peristilahannya Penelitian deskriptif merupakan aplikasi dari metode penelitian kualitatif yang hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Penelitian deskriptif

digunakan karena cocok untuk melukiskan secara tepat sifat-sifat sesuatu individu, keadaan gejala, dsb yang merupakan objek penelitian.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu suatu keadaan, gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala, keadaan (Suharsimi, 1990:309-310).

Penelitian dilakukan dengan melakukan pengambilan data dan observasi di lokasi kunjungan peneliti dalam kegiatan Magang Indonesia Berdaya yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2013. Lokasi tersebut adalah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu Provinsi Riau. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan FGD terhadap stakeholders fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Riau, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian juga melakukan update data melalui jurnal yang berisi penelitian tentang hasil-hasil program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok simpan pinjam yang berlokasi dari Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam Kelompok di Provinsi Riau

Komitmen Pemerintah Riau dalam program pemberdayaan masyarakat seperti contohnya adalah PNPM Mandiri sangat tinggi. Kondisi ini terlihat dari adanya berbagai macam program simpan pinjam yang diimplementasikan saat peneliti melakukan pengamatan. Program-program tersebut antara lain adalah:

1) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan.

Pengelola program Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Jumlah alokasi pinjaman adalah maksimal 25% dari Bantuan Langsung Masyarakat PNPM ke kecamatan. Kredit awal perkelompok maksimal 10 juta perkelompok dalam 1 tahun, jika lancar bisa meminjam lagi. Simpan pinjam perempuan tidak harus untuk usaha tetapi kalau untuk pinjaman ekonomi produktif harus ada analisa usaha. Kriteria simpan pinjam perempuan adalah (1) kelompok lebih dari 1 tahun, (1) anggota saling mengenal (3)

ada catatan pembukuan. Dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tidak ada aturan pembatasan.

2) Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan salah satu kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program PPD (Makmur, 2015) merupakan program dari Pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi kemiskinan. Program PPD mempunyai 3 dimensi yaitu:

- a) Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka dan (transparan) dan penuh tanggung jawab.
- b) Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
- c) Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi desa/kelurahan.
- d) Mengurangi ketergantungan masyarakat sekitar dari rentenir.
- e) Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- f) Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
- g) Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.
- h) Memenuhi kebutuhan sarana dan Prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan.

Jenis Kegiatan PPD adalah Program Pemberdayaan Desa yang meliputi: (a) kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral. (b) kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Ekonomi Desa/kelurahan- Simpan Pinjam (UED/K-SP). Program PPD dikelola oleh Provinsi Riau dengan alokasi dana adalah Rp. 500 juta perdesa, tanpa memperhatikan desa kaya/miskin. Salah satu kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa adalah Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok dengan nama Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Pengelola program UED-SP adalah Badan Usaha Milik Desa dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya alokasi dana adalah Rp.250-500 juta/desa, setiap desa mendapatkan satu kali pendanaan dengan sumber bisa dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Target alokasi 600 desa dalam 3 tahun oleh

pemerintah provinsi, kekurangannya dari dana APBD kabupaten. Konsep simpan pinjam BUMDes UED-SP mengadopsi dari program SPP PNPM Mandiri. Program simpan pinjam harusnya tidak hanya mengembangkan konsep meminjam tetapi juga konsep menabung. Di dalam konsep UED-SP konsep meminjam dan menabung besar. BUMDes bisa mengelola modal dari anggota untuk digulirkan kembali dalam bentuk pinjaman.

Lembaga UED-SP terdiri dari tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari otoritas rekening, pengawas umum, staf analisis kredit, kader pembangunan masyarakat, pengelola UED SP dan tenaga pendamping yang ditunjuk pemerintah. Otoritas rekening adalah orang yang berhak menandatangani penyaluran dana usaha desa dari rekening desa ke Rekening UED-SP yang terdiri atas Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dan wakil perempuan yang dipilih melalui musyawarah yang ditetapkan oleh keputusan desa dan disahkan Bupati. Pengawasan umum dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Analisa kredit bertugas menilai kelayakan calon peminjam yang dibentuk melalui pertemuan khusus. Kader pembangunan masyarakat dibentuk dan dipilih dalam forum musyawarah desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui forum musyawarah.

Selain tim pelaksana kegiatan pengelolaan kegiatan UED-SP juga dikelola oleh Ketua, kasir, tata usaha dan staf analisa kredit yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah masyarakat dan disahkan oleh Bupati. Masa kerja pengelola adalah 3 (tiga tahun) dan dapat dipilih kembali.

Pinjaman terdiri dari 2 jenis yaitu pinjaman dengan agunan, dan pinjaman tanpa agunan (jumlah pinjaman maksimal 1 juta). Pinjaman dengan agunan minimal agunan BPKB motor). Pinjaman tanpa agunan cukup dengan menggunakan KTP atau KK, dan mengajukan proposal pinjaman.

3) Lembaga Ekonomi Desa (LED)

Lembaga Ekonomi Desa merupakan program ekonomi produktif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar. Pengelolaan program ini dilakukan di tingkat desa, dibawah koordinasi Bapeda Kabupaten Kampar. Ada yang menggunakan mekanisme BUMDes, ada yang menggunakan mekanisme koperasi. Besarnya alokasi dana program yang dikelola adalah RP. 250 juta, *pilot project* dan hanya satu kali cair, tidak semua desa mendapatkan program pada tahun 2009. Desa yang mendapatkan program harus memenuhi kategori desa tertinggal. Kelompok boleh laki-laki atau perempuan.

Adanya berbagai program simpan pinjam kelompok diatas memunculkan berbagai alternatif sumber simpan pinjam di masyarakat. Dari beberapa wawancara dengan anggota masyarakat mereka lebih suka melakukan akses simpan pinjam yang mempunyai kantor di Balai Desa/kelurahan karena lebih dekat dengan tempat tinggal. Kondisi tersebut memunculkan kurangnya minat masyarakat untuk melakukan akses simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan yang berlokasi di Kantor Kecamatan. Kondisi ini menyebabkan banyaknya dana simpan pinjam yang tidak tersalurkan dan mengendap di bank. Secara umum gambaran riil pelaksanaan berbagai pemberdayaan perempuan melalui simpan pinjam kelompok tersebut di Provinsi Riau dapat dilihat kita lihat contohnya di kabupaten Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu seperti di bawah ini.

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam Kelompok di Kabupaten Kampar

Salah satu kecamatan yang dikunjungi dan dilakukan penelitian tentang program pemberdayaan perempuan dengan kelompok simpan pinjam di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Tambang. Kelompok aktif PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan tambang adalah 113 kelompok (1000 lebih anggota) dengan aset 2 milyar keatas, dan 75 % adalah Rumah Tangga Miskin (RTM).Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh UPK terhadap anggota kelompok adalah dari segi itikad membayar sebagian anggota. Tidak semua desa di Kecamatan Tambang terdapat kelompok simpan pinjam dari PNPM Mandiri Pedesaan. Kepala desa lebih menganjurkan masyarakat untuk meminjam di UED-SP yang merupakan Badan Usaha Milik Desa. Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Tambang 9 desa aktif di SPP PNPM, 3 desa mengalami kredit macet, dan 9 desa tidak mengakses SPP PNPM tetapi aktif meminjam di UED-SP. Ada desa yang jika sudah ada UED-SP kepala desa tidak memperbolehkan masyarakat untuk meminjam di SPP PNPM. Sebagian masyarakat lebih berminat meminjam di BUMDes UED SP daripada di SPP PNPM Mandiri karena adanya kemudahan akses (lokasi dekat) karena berada ditingkat desa, hasil-hasil langsung dapat dinikmati masyarakat, ada program undian, ada pembagian beasiswa, semua anggota dapat sembako.

Hasil penelitian Sukrini (2011) tentang Peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam Meningkatkan Usaha Rakyat di Desa Tabing Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar Program Lembaga Ekonomi Desa (LED) mempunyai peranan

yang sangat penting terhadap peningkatan usaha masyarakat, masyarakat yang mempunyai usaha merasa terbantu.

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam Kelompok di Kabupaten Rokan Hulu

Disampaikan oleh pengelola BUMDes UED SP Desa Kepenuhan Raya menjelaskan bahwa ada penilaian dari pemerintah untuk desa-desa yang mendapatkan dana UED-SP. Salah satu kriterianya adalah mempunyai kantor bersurat minimal hibah, administrasi bagus, angka kredit macet lebih kecil dari 5%. Penambahan Modal BUMDes UED-SP Desa Kepenuhan Raya:

Tabel 1. Jumlah Bantuan Modal dan Perkembangan Aset Program UED-SP Kecamatan Kepenuhan Raya

Tahun	Bantuan
2005	250 juta
2007	200 juta
2010	Menjadi BUMDes
2012	Aset: Rp. 1.511.891.416 Omset: Rp.3.015.682.823

Kunci sukses BUMDEs Desa Kepenuhan Raya adalah memupuk kepercayaan masyarakat, masyarakat mempunyai penghasilan tetap dari kebun sawit, jika terjadi kemacetan 1-2 bulan dilakukan pemanggilan melalui surat, jika menunggak pada bulan ke-4 didatangi beramai-ramai. Selama menjadi BUMDes penghasilan perbulan BUMDes tidak pernah dibawah Rp. 20 juta perbulan terkadang Rp. 40 juta lebih. Ini berdampak pada penggajian SDM yang hasilnya direksi pernah sampai Rp. 4 jutaan tergantung dari penghasilan perbulan. Hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kabupaten Rokan Hulu (Makmur, 2015) menemukan terjadi peningkatan pendapatan dan usaha berkembang setelah menggunakan dana bergulir PPD.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ada beberapa jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam kelompok yang diimplementasikan di Provinsi Riau yaitu kegiatan kelompok simpan pinjam perempuan yang merupakan bagian dari Program PNPM Mandiri Pedesaan, Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UED-SP) yang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) serta program Lembaga Ekonomi Desa (LED).
2. Berbagai kegiatan simpan pinjam kelompok yang ada dirasakan kemanfaatannya dalam penumbuhan usaha mikro di Provinsi Riau. Kegiatan kelompok simpan pinjam yang berlokasi di desa yaitu Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UED-SP) dan Program Lembaga Ekonomi Desa (LED) lebih disukai masyarakat karena dekat dan kemanfaatannya lebih dirasakan oleh masyarakat.
3. Adanya berbagai jenis kegiatan simpan pinjam membuat kegiatan Simpan Pinjam PNPM Mandiri Pedesaan kurang diminati sehingga sebagian dananya tidak tersalurkan dan mengendap di Bank.

Saran:

1. Perlu adanya pengelolaan secara professional untuk melestarikan lembaga-lembaga yang mengelola dana-dana bergulir sehingga tidak terbengkalai setelah habis masa pendampingannya
2. Perlu adanya kerjasama antara lembaga untuk menyalurkan dana simpan pinjam kepada masyarakat sehingga lebih banyak diserap dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyati, 2013, Laporan Magang Indonesia Berdaya, PNPM Support Facility, Jakarta.
- Bliss, Susan.2005. Microcredit-Small Loans-Big Dreams. Geography Teachers Association of New South Wales for Geography Bulletin, New South Wales.
- Budiman,2007,Mikro-Kredit Bagi Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Kasus, Majalah Ekonomi dan Komputer Nomor 1 Tahun XV-2007. Fakultas Ekonomi Universitas Guna Darma. Depok.
- Hatu,Rauf A, 2010, Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis), Jurnal Inovasi Volume 7 Nomor 4, Gorontalo.

- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat*, Pustaka Gramedia, Jakarta.
- Makmur, 2015, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kabupaten Rokan Hulu*, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol 4 No.1 Januari 2015. Pasir Pangaraian.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sukrini, Wirayati, 2011, *Skripsi: Peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau menurut Ekonomi Islam*.
- Wardoyo dan Prabowo, Hendro. 2005. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha kredit Mikro Koperasi Warga*. Jakarta: Kusuma Tiara.
- Zubaedi, 2007, *Wacana Pembangunan Alternatif*. Ar-Ruzz Media Group. Yogyakarta.